

## TINJAUAN PERKEMBANGAN REGIONAL DAN GLOBAL

**Tantangan Hubungan Indonesia-Australia dan  
Komunitas ASEAN 2015***Lina A. Alexandra dan Katrina S. Gonzalez***PENGANTAR**

Dalam kuartal keempat tahun 2013, terdapat dua peristiwa politik penting, yang akan membawa implikasi besar bagi Indonesia maupun ASEAN dalam beberapa waktu ke depan. *Pertama*, setelah periode hubungan yang lancar dan konstruktif antara pemerintah Indonesia dengan Australia, terjadi perubahan di pemerintahan di Australia dari Partai Buruh Australia (Australian Labour Party) menjadi koalisi partai Liberal-Nasional, telah menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia, terutama dalam kebijakan menghadapi ancaman pencari suaka. Kebijakan pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Tony Abbott, yang terpilih pada September 2013, untuk mengendalikan jumlah imigran gelap yang datang ke Australia telah dilihat oleh Indonesia sebagai tantangan atas kedaulatan nasional Indonesia. Peristiwa *kedua* adalah hasil dari KTT ASEAN di Brunei Darussalam, Oktober 2013. Menyusul kegagalan memalukan ASEAN untuk mengeluarkan Komunike Bersama di Phnom Penh pada KTT ASEAN April 2012, keberhasilan KTT kali ini di Brunei relatif telah membawa ASEAN kembali ke jalur tepat menuju pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015.

## TANTANGAN BARU HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA

Partai Koalisi Liberal-Nasional yang dipimpin oleh Tony Abbott pada pemilu September 2013, meraih 88 kursi di parlemen dalam pemilihan umum terakhir di Australia dan berhasil mengalahkan Partai Buruh yang telah berkuasa selama enam tahun terakhir. Terpilihnya Tony Abbott sebagai Perdana Menteri Australia yang baru dan perubahan mayoritas di parlemen menandai perubahan yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Australia, yang sebelumnya didominasi pimpinan Partai Buruh. Hal ini memiliki implikasi besar bagi hubungan Indonesia dengan Australia. Meskipun rincian strategi kebijakan luar negeri Abbott di bidang-bidang tertentu sedikit rancu dan dikemas dalam slogan-slogan seperti 'Lebih Jakarta, Kurang Geneva' (More Jakarta, Less Geneva), terdapat perbedaan jelas dalam bidang pengawasan perbatasan, bantuan internasional dan pendekatan diplomatik secara keseluruhan dalam kebijakan luar negeri Australia.

Meskipun PM Abbott secara retorik menyatakan pentingnya Indonesia sebagai 'teman' dan tetangga, perkembangan terakhir mengenai kegiatan mata-mata Australia yang menargetkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara dan lingkaran dalam Presiden melalui kawat-penyadapan ponsel telah menyebabkan gangguan hubungan diplomatik dan politik yang serius dalam hubungan bilateral kedua negara. Pernyataan Abbott kepada parlemen Australia tentang masalah ini tidak mengandung nada penyesalan mengakibatkan kemarahan publik domestik di Indonesia sehingga mendorong Presiden SBY untuk menarik Duta Besar Indonesia dari Australia.

Kondisi ini sangat berlawanan jika dibandingkan dengan hubungan bilateral kedua negara beberapa tahun lalu. The Indonesia Poll 2012 yang dirilis oleh Lowy Institute, yang mengukur kehangatan hubungan bilateral menemukan bahwa di antara 21 negara, perasaan Indonesia terhadap negara tetangga Australia mencapai tingkat 62 derajat, sementara hubungan terhangat adalah dengan Jepang, yang terukur pada 66 derajat. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2006 ketika hubungan Indonesia terhadap Australia hanya mencapai 51 derajat, yang dianggap sebagai hubungan yang kurang

hangat<sup>1</sup>. Sebaliknya, meskipun tercatat banyaknya jumlah turis ke Bali dan daerah lainnya di Indonesia, sekitar 33% warga Australia mengatakan bahwa Indonesia merupakan ancaman yang lebih besar bagi Australia sekarang dibandingkan 15 tahun yang lalu ketika Indonesia masih berada di bawah rezim otoriter. Oleh karena itu, tampaknya kebijakan administrasi baru di Australia sedikit banyak mencerminkan perasaan semacam ini terhadap Indonesia.

### *Perubahan sikap Australia pada Pencari suaka politik*

Meskipun masalah pencari suaka hanya bagian dari agenda kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Australia, namun penanganan pencari suaka transit melalui Indonesia untuk mencapai pantai Australia terbukti sulit untuk ditangani. Sewaktu pencalonan diri Tony Abbott untuk menjadi Perdana Menteri, ia menjamin bahwa akan menempatkan kebijakan kontrol perbatasan yang ketat untuk mencegah kedatangan imigran gelap. Ia juga menyatakan bahwa akan 'memutar-balikkan perahu' bila mungkin. Di samping itu, dalam Operasi Sovereign Borders yang disusun selama kampanye pemilihannya, Abbott juga menguraikan rencananya untuk memperlakukan masalah ini sebagai keadaan darurat nasional dan menerapkan penggunaan jenderal bintang tiga sebagai kepala respon militer<sup>2</sup>.

Posisi tangguh Abbott telah menyebabkan banyak ketegangan sebagai akibat dari kebijakan yang menyinggung langsung masalah kedaulatan dan keamanan nasional kedua negara. Koalisi telah menyuarakan preferensi untuk menangani masalah ini dalam konteks kerja sama bilateral yang bertentangan dengan forum multilateral, yang awalnya lebih disukai Indonesia. Australia dan Indonesia telah menyetujui penanganan isu penyelundupan manusia melalui pembicaraan bilateral yang didiskusikan dalam *Bali Process*, atau 'Bali Plus', sesuai dengan istilah Abbott<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Fergus Hanson, "Shattering Stereotypes: Public Opinion and Foreign Policy," *Lowy Institute, Indonesia Poll 2012*, p. 7.

<sup>2</sup> "The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy," *Liberal Party of Australia*, July 2013, [http://lpaweb-static.s3.amazonaws.com/Policies/OperationSovereignBorders\\_Policy.pdf](http://lpaweb-static.s3.amazonaws.com/Policies/OperationSovereignBorders_Policy.pdf)

<sup>3</sup> "Australia and Indonesia: Boats, cows and grass," *Economist*, 5 October 2013.

Penyelesaian masalah ini, membutuhkan kerja sama yang intensif yang akan sulit dicapai apabila Canberra terus memilih strategi yang seolah mengabaikan persetujuan Indonesia. Se jauh ini, Abbott telah menyatakan dukungan untuk tiga strategi dalam menangani penyelundupan orang, yaitu (1) memulangkan kembali perahu para pencari suaka ke negara asalnya, (2) membeli kembali perahu untuk mencegah penjualan perahu kepada penyelundup manusia, dan (3) membayar warga negara Indonesia untuk menjadi informan atas kegiatan penyelundupan manusia. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop sebelumnya juga menyatakan bahwa Australia tidak perlu untuk meminta izin dari pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan terhadap pencari suaka<sup>1</sup>.

Semua strategi tersebut menimbulkan kecemasan atas pelanggaran kedaulatan Indonesia. Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi IDPR Indonesia, mengatakan bahwa strategi yang disarankan Abbott "merendahkan dan menyinggung martabat Indonesia" dan menyebutkan lebih lanjut bahwa "Indonesia bukan koloni Australia yang dapat dibeli untuk kepentingan negara lain"<sup>2</sup>. Anggota lain dari Komisi Luar Negeri Indonesia, Tantowi Yahya, juga telah menyatakan keprihatinan atas konsekuensi dari kebijakan hubungan Indonesia - Australia dan dampaknya pada kedaulatan Indonesia<sup>3</sup>.

Laksamana Bambang Suwanto yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Keamanan Maritim Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tertekan oleh Australia untuk mengadopsi strategi yang bertujuan untuk menghentikan kapal dengan cara apapun. Sebaliknya, Ia memerintahkan 13 otoritas maritim Indonesia untuk bertindak sesuai dengan hukum dan prosedur nasional<sup>4</sup>. Pada

<sup>1</sup> "Coalition won't be asking for Indonesia's permission on asylum seeker policies: Bishop," 16 September 2013, <http://www.abc.net.au/news/2013-09-16/coalition-to-ask-indonesia-for-understanding-not-permission/4959976>

<sup>2</sup> "Mahfudz Siddiq Calls Australia Opposition's Asylum-Seeker Plan 'Crazy'," *Jakarta Globe*, 27 August 2013, <http://www.thejakartaglobe.com/news/mahfudz-siddiq-calls-australia-oppositions-asylum-seeker-plan-crazy/>

<sup>3</sup> Sophie Brown, "Australia's Asylum Seeker Policy is 'Offensive and Illegal': Indonesian MP," *Time*, 19 September 2013, <http://world.time.com/2013/09/19/australias-asylum-seeker-policy-is-offensive-and-illegal-indonesian-mp/>

<sup>4</sup> "RI rejects Australia's people smuggling proposal," *The Jakarta Post*, 12 November 2013, <http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/12/ri-rejects-australia-s-people-smuggling-proposal.html>

8 November 2013 Australia meminta agar Indonesia menerima kapal penyelamat yang membawa 60 pencari suaka bertujuan Australia. Permintaan itu tidak dikabulkan dan kebuntuan hubungan pun terjadi. Karena dari sejak awal tidak pernah menyetujui kebijakan *towing-back* Australia maka Indonesia menolak tiga permintaan terakhir dari Australia untuk menerima kapal penyelamat diantara bulan September dan November tahun ini<sup>8</sup>.

### *Pengurangan dan Pengaturan bantuan luar negeri Australia*

Keputusan pemerintah Australia untuk memotong anggaran bantuan luar negeri dan realokasi tabungan berjumlah A\$ 4,5 miliar selama tiga tahun untuk infrastruktur dan jalan proyek domestik dipastikan akan menunda komitmen Australia sebelumnya, yaitu menaikkan pengeluaran untuk bantuan asing ke 0,5% dari GNI pada tahun 2015-2016<sup>9</sup>. Di bawah pemerintahan Abbott, pengeluaran sebesar 0,5% dari GNI itu dikatakan tetap menjadi tujuan nasional meskipun Canberra telah menolak untuk memberikan jangka waktu untuk realisasinya.

Selain itu, AusAID direncanakan untuk menjalani perubahan struktural karena pemerintah baru telah memutuskan untuk menggabungkan badan bantuan dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan dalam upaya penyelarasan tujuan diplomatik dengan kegiatan pemberian bantuan. Walaupun langkah ini sah-sah saja, bisa dirasakan meningkatnya sikap politisasi terhadap kebijakan ini.

Pada 2012-2013, Indonesia menerima sekitar A\$541.6 juta dalam dana bantuan dari Australia terutama berfokus pada pendidikan, pemerintahan, pembangunan ekonomi dan kesehatan. Indonesia merupakan penerima tunggal terbesar bantuan luar negeri dari Australia. Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat ini jelas menjadi tantangan sendiri bagi Indonesia. Salah satu tantangan yang mungkin timbul dari hal ini adalah munculnya efek negatif dari

---

<sup>8</sup> Ina Parlina, "Govt stands its ground on asylum standoff," *The Jakarta Post*, 10 November 2013.

<sup>9</sup> "Australia's new PM vows to cut foreign aid," *Al Jazeera*, 8 September 2013, <http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/09/20139854334779191.html>

pengurangan bantuan ke sektor pendidikan, sebagai sektor yang menerima jumlah bantuan terbesar dari Australia<sup>10</sup>.

### *Skandal Spionase*

Informasi yang dirilis oleh Edward Snowden pada kegiatan mata-mata yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan pemerintah Australia telah memicu reaksi keras antara sekutu dan negara-negara tetangga. Sementara respon cepat Obama untuk mencari permintaan maaf telah mampu meredam murka sekutunya, akan tetapi kasus sebaliknya terjadi dalam hubungan Indonesia-Australia. Kegiatan penyadapan yang dilakukan Australia pada tahun 2009 menargetkan sepuluh pejabat di kabinet Yudhoyono, termasuk Presiden dan Ibu Negara Ani Yudhoyono<sup>11</sup>.

Sikap pemerintahan Abbott yang melemparkan semua kesalahan tersebut kepada pemerintahan sebelumnya, dan tidak segera menyatakan permintaan maaf dan berjanji untuk menghentikan kegiatan intelijen tersebut telah menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil garis keras pada masalah ini dan untuk tidak meredam kemarahan domestik<sup>12</sup>. Selain itu, terlihat jelas bahwa pemerintahan Australia saat ini tidak memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika politik di Indonesia, di mana Presiden Indonesia saat ini telah digambarkan sejak lama sebagai figur yang lambat dan peragu dalam mengambil keputusan. Akibatnya, kasus ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk merubah persepsi umum, terutama di saat-saat akhir pemerintahannya<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Donny Syofyan, "Indonesia remains important for Australia under Abbott," *The Jakarta Post*, 10 September 2013.

<sup>11</sup> Sembilan pejabat kabinet adalah Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden), Boediono (Wakil Presiden), Jusuf Kalla (Mantan wakil presiden), Dino Pati Djalal (Juru bicara asing), Andi Malarangeng (Juru bicara domestik), Hatta Rajasa (Sekretaris negara), Sri Mulyani (MENKO EKON), Widodo AS (MENKO POLKAM), dan Sofyan Djalil (Menteri dan tangan kanan), lalu Ibu Ani Yudhoyono (Ibu negara), "Diplomatic fallout from the latest Snowden revelations," 18 November 2013, <http://www.lowyinterpreter.org/post/2013/11/18/Reveal-their-secrets-protect-our-own.aspx>

<sup>12</sup> Dave McRae, "Abbott's failure to listen escalates spying row," [http://lowyinstitute.org/files/dave\\_mcrac\\_abbotts\\_failure\\_to\\_listen\\_escalates\\_spying\\_row.pdf](http://lowyinstitute.org/files/dave_mcrac_abbotts_failure_to_listen_escalates_spying_row.pdf)

<sup>13</sup> Peter McCawley, "Australia-Indonesia relations: Where to from here?" <http://www.lowyinterpreter.org/post/2013/11/20/Australia-Indonesia-Dont-expect-things-to-get-easier.aspx>

Keseriusan masalah ini dapat dilihat dari keputusan Presiden untuk menarik Duta Besar Indonesia dari Australia. Presiden mengumumkan bahwa kerja sama di semua sektor, termasuk bidang penyelundupan manusia, pertahanan dan intelijen akan dievaluasi dan dihentikan selama jangka waktu yang tidak pasti. Selain itu, kemitraan strategis antara kedua negara juga akan ditinjau. Beberapa pengamat percaya bahwa hubungan akan segera membaik karena banyak kepentingan umum yang dimiliki oleh kedua negara. Lebih dari itu perlu bagi administrasi baru Abbott untuk memahami Indonesia dengan lebih baik dan menyadari secepatnya peran penting yang akan dimainkan Indonesia secara regional di masa depan. Ini telah dijabarkan dengan baik oleh Dennis Richardson, mantan Sekretaris Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, yang sekarang menjadi Sekretaris Departemen Pertahanan,

*"[Another] big challenge is to continue to manage our near neighbourhood relations with deftness and sensitivity, consistent with our national interests. This is a challenge which confronts successive generations of Australian foreign policy advisers and decision makers. We have had mixed success. But the environment is changing. It is only a matter of time before we have a neighbour in Indonesia which has a bigger economy in nominal terms than our own. We are not used to that. As Indonesia grows wealthier and more confident it will become increasingly difficult for Australia to gain the attention of Indonesian decision makers to the extent that we think our interests might warrant. In other words, we may need to become more selective in what we push and what we ask for"<sup>14</sup>*

Indonesia yang kooperatif tentu akan membawa lebih banyak keuntungan bagi Australia dalam hal perdagangan dan dukungan

<sup>14</sup> "Tantangan besar [lain] adalah untuk terus mengelola hubungan lingkungan dekat kami dengan kemahiran dan kepekaan, konsisten dengan kepentingan nasional kami. Ini merupakan tantangan yang dihadapi generasi-generasi penasihat kebijakan luar negeri Australia dan pengambil keputusan. Level sukses variatif, tetapi lingkungan berubah. Ini hanya masalah waktu sebelum Indonesia menjadi tetangga yang memiliki ekonomi yang lebih besar secara nominal dari kami sendiri. Kami tidak terbiasa dengan itu. Sewaktu Indonesia tumbuh lebih kaya dan lebih percaya diri, akan menjadi semakin sulit bagi Australia untuk mendapatkan perhatian dari para pengambil keputusan Indonesia untuk menjamin kepentingan kami. Dengan kata lain, kami mungkin perlu untuk menjadi lebih selektif dalam apa yang kami dorong dan apa yang kami minta", (dari ibid).

untuk kegiatan kontraterorisme Australia dan kebijakan pencegahan imigran gelap.

### *Menuju Masa Depan*

Gangguan dalam hubungan antara Australia dan Indonesia dewasa ini merupakan periode paling tegang sejak krisis Timor Timur tahun 1999. Keterlibatan Australia di Timor Timur kerap dipandang dengan kecurigaan dan keraguan mengenai dukungan Australia untuk persatuan Indonesia dan integritas teritorial<sup>15</sup>. Ini menciptakan suasana ketidakpercayaan antara kedua belah pihak dan memperkuat pandangan bahwa Australia mendukung gerakan separatis di Indonesia<sup>16</sup>. Akibatnya, ketidakpastian mengenai niat Australia di wilayah ini masih bertahan, membuat kepercayaan antara kedua negara tidak stabil dan sensitif terhadap peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Selepas krisis, kedua negara mampu menormalkan hubungan karena sambutan hangat yang diberikan oleh Perdana Menteri Australia Howard menuju pemilihan Presiden SBY pada tahun 2004. Kedua pemimpin mengembangkan hubungan pribadi secara damai dengan dasar memperkuat dan memperdalam hubungan, yang kemudian terwujud dalam Traktat Lombok yang menggarisbawahi dukungan untuk kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah kedua negara. Hubungan antara kedua negara terus membaik di bawah pemerintahan Rudd karena pengalaman historis positif Indonesia dengan pemerintahan Buruh<sup>17</sup> dan hubungan baik Rudd dengan Presiden SBY memungkinkan relasi antar warga yang layak<sup>18</sup>.

Agar Australia dan Indonesia bisa memindahkan ketegangan masa lalu dan menghindarkan munculnya kembali isu-isu ketidakpercayaan

<sup>15</sup> "Indonesia relations: Three lessons from Timor", Iain Henry, Lowy Interpreter, 1 August 2013, <http://www.lowyinterpreter.org/post/2013/08/01/Indonesia-Three-lessons-from-Timor.aspx>

<sup>16</sup> "What Indonesia's Rise Means For Australia", Hugh White, The Monthly, June 2013, <http://www.themonthly.com.au/issue/2013/june/1370181600/hugh-white/what-indonesia-s-rise-means-australia>

<sup>17</sup> Priyambudi Sulistiyanto, "Indonesia-Australia Relations in the Era of Democracy: The View from the Indonesian Side", *Australian Journal of Political Science*, 1 (2010): 117-132.

<sup>18</sup> Editorial: Bye Kevin. Hello Julia?, *Jakarta Post*, 25 June 2010, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/06/25/editorial-bye-kevin-hello-julia.html>

karena beberapa kasus penyesuaian dewasa ini, Tony Abbott harus mengambil pelajaran dari dua kasus di masa lalu. *Pertama*, janji-janji retorik untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan harus diperkuat dengan komitmen yang nyata. Hal seperti ini menjadi dasar terbentuknya Traktat Lombok, yang menjelaskan hubungan antara Indonesia dan Australia di bidang-bidang kunci dan pentingnya adanya pengakuan dari pihak Australia terhadap kedaulatan pemerintahan Indonesia.

Dalam hal penyesuaian Australia di Indonesia, Presiden SBY mengusulkan enam cara yang mengacu ke normalisasi hubungan yang diharapkan dapat menciptakan semacam kode etik hubungan dan protokol intelijen sebagai panduan bagi kedua negara, tetapi yang lebih penting lagi, menjamin adanya sikap kooperatif yang berdasarkan persahabatan dari kedua belah pihak. Daripada menyikapi dengan sikap tidak ramah, akan lebih baik apabila Abbott bisa mempergunakan kesempatan ini untuk membangun kembali kepercayaan dengan Indonesia dalam upayanya untuk membina hubungan yang lebih baik dengan negara tetangga. *Kedua*, hubungan antara pemimpin kedua negara sangat penting. Rudd mampu membina hubungan baik dengan Indonesia sebagian besar karena hubungan baiknya dengan Presiden SBY. Di sisi lain, hubungan Abbott dengan rekannya di Jakarta tetap tegang dan sekarang diperburuk oleh tanggapannya terhadap kasus penyesuaian.

Pernyataan kontradiktif yang diberikan oleh Abbott dan Bishop atas ketidakpastian sikap Australia dalam pengumpulan data intelijen terhadap Indonesia melemahkan proses pembangunan kepercayaan yang sedang dibina kedua negara<sup>19</sup>. Selain itu, tidak terjalinnnya hubungan pribadi antara kedua pemimpin ditambah dengan pernyataan kontroversial dari Canberra oleh PM Abbott dan perhatian media yang tertuju kepada masalah di Indonesia hanya memicu suasana kecurigaan. Jika Abbott tulus dalam keinginannya untuk memperbaiki hubungan Australia dengan Indonesia, pernyataan publik harus konsisten dengan tujuan ini. Selain itu, pen-

---

<sup>19</sup> "RI unsure about Australia's 'sincerity'", Bagus BT Saragih, Jakarta Post, 8 December 2013, <http://www.thejakartapost.com/news/2013/12/08/ri-unsure-about-australia-s-sincerity.html>

dekatan kepada *roadmap* yang diusulkan oleh Presiden SBY tidak perlu dibebani dengan sikap enggan dan arogansi. Di sisi lain, Abbott harus melihat ini sebagai kesempatan untuk mengubah hubungan bilateral yang tidak tenang menjadi satu yang menyerupai kemitraan yang dibangun di atas kepercayaan dan rasa hormat .

## PROSPEK ASEAN 2014 DAN MASA DEPAN

### *Kepemimpinan sukses Brunei Darussalam pada 2013*

Kepemimpinan Brunei Darussalam di ASEAN pada tahun 2013 dianggap cukup sukses, dimulai saat Brunei menetapkan untuk mengambil langkah penerapan cetak biru untuk penyatuan ASEAN dalam persiapan pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Komunitas ini akan didasarkan pada tiga pilar: Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC). Saat ini, sekitar 79,7% dari saran dalam cetak biru AEC telah berhasil diimplementasikan, sementara sekitar 90% dari cetak biru ASCC telah dilaksanakan<sup>20</sup>. Di sisi lain, kemajuan positif juga terlihat dalam capaian cetak biru, antara lain terbentuknya Badan HAM ASEAN, Deklarasi HAM ASEAN, dan dalam waktu dekat ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) sebagai mekanisme regional yang mampu berperan efektif dalam penanganan konflik di kawasan.

Dalam upaya untuk mengurangi ketegangan di sekitar Laut China Selatan, Brunei telah berperan penting dalam membawa pihak-pihak kembali ke meja perundingan. Pada ASEAN Regional Forum tahun ini (ARF), China memutuskan untuk memulai pembicaraan mengenai aturan main atau Code of Conduct (CoC) untuk mengatasi sengketa Laut China Selatan. Sebuah pembaharuan komitmen antara ASEAN dan China untuk berkonsultasi dan berdiskusi secara formal tentang perumusan CoC yang mengikat telah dilakukan, terutama karena adanya kekhawatiran mengenai meningkatnya sentimen nasionalisme yang bisa mengancam keamanan dan perdamaian

---

<sup>20</sup> "Our People, Our Future Together," Chairman's Statement Of The 23rd ASEAN Summit, Bandar Seri Begawan, 9 October 2013.

regional. Meskipun hasil yang nyata belum terlihat, Brunei telah menunjukkan keefektifan kepemimpinannya yang telah menyebabkan berkurangnya ketegangan antara ASEAN dan China dan membawa kedua pihak selangkah lebih dekat menuju perdamaian.

Langkah yang akan diambil oleh ASEAN di masa depan sudah dibahas dalam beberapa pertemuan dan KTT yang diadakan tahun ini. Hal ini telah memperjelas visi ASEAN pasca 2015 yang penting untuk kemajuan secara lebih lanjut dari wilayah ASEAN. Sementara itu, Dewan Koordinasi ASEAN bertugas menyusun Visi pasca-Komunitas ASEAN 2015<sup>21</sup>. ASEAN juga tetap bertekad untuk melipatgandakan PDB gabungannya dari US\$ 2,25 triliun menjadi US\$ 4,4 triliun, memangkas angka kemiskinan menjadi setengah dari 18,6% ke 9,3%<sup>22</sup>.

Selain itu, KTT ini juga telah berhasil mengadakan peluncuran Outlook Keamanan ASEAN untuk pertama kalinya. Peluncuran Outlook ini harus dilihat sebagai upaya pertama untuk menyamakan pendapat terhadap jaminan keamanan yang dihadapi oleh ASEAN dan oleh negara secara individu atas persepsi kemampuan militer dan alokasi anggaran masing-masing negara. Sejauh ini, tantangan keamanan non-tradisional seperti terorisme dan bencana alam mendominasi Outlook ini, sementara rasa takut atas memuncaknya persaingan antara kekuatan-kekuatan besar yang dapat berimplikasi ke persatuan dan stabilitas ASEAN telah menjadi kekhawatiran utama. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang disebabkan oleh tidak adanya standarisasi untuk menentukan banyaknya informasi yang harus diberikan oleh setiap anggota mengenai skala dan anggaran militer mereka, dikarenakan keengganan untuk menyebutkan informasi tersebut.

### *Kepemimpinan Myanmar di ASEAN pada 2014*

Untuk pertama kalinya, Myanmar akan mengetuai ASEAN pada tahun 2014 dan karena itu akan menjadi tuan rumah untuk berbagai pertemuan regional, termasuk dua pertemuan tingkat tinggi

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Luke Hunt, "Brunei Caps Off a Solid Year at ASEAN's Helm," *The Diplomat*, 12 October 2013, <http://thediplomat.com/2013/10/brunei-caps-off-a-solid-year-at-aseans-helm/>

pada tahun depan. Kepemimpinan Myanmar di ASEAN juga secara simbolis merupakan cermin pengakuan atas kerja rezim di Myanmar untuk memperbaiki catatan hak asasi manusianya<sup>23</sup>. Dalam rangka itu, Presiden U Thein Sein melakukan sejumlah perubahan politik antara lain pembebasan ratusan tahanan politik, legalisasi serikat-serikat dan de-sensor jaringan media seperti BBC.

Akan tetapi, sejumlah kekhawatiran masih terasa terkait dengan kapasitas Myanmar untuk melakukan persiapan logistik untuk menjadi tuan rumah dari 1.100 pertemuan yang akan dilaksanakan tahun depan, antara lain kurangnya pegawai negeri sipil (PNS) terampil dan infrastruktur dasar yang tersedia. Ibukota Naypyidaw yang diatur untuk menjadi tempat pertemuan-pertemuan ASEAN diharapkan juga dapat menghadapi masalah krisis listrik dan konektivitas internet. Pihak pemerintah Myanmar berjanji bahwa tugas besar tersebut akan terpenuhi dan telah berkonsultasi dengan para diplomat dari Singapura, Thailand, dan Korea Selatan mengenai tugas kepemimpinannya di ASEAN pada tahun depan.

Di bawah slogan "Ke depan dalam kesatuan dengan masyarakat yang damai dan sejahtera", Myanmar akan berusaha untuk membangun di atas dasar yang telah disusun oleh para Ketua ASEAN sebelumnya untuk terus mendorong transisi ke Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Keketuaan Myanmar, yang hanya setahun sebelum terciptanya Komunitas ASEAN pada 2015, mengharuskan Myanmar untuk memobilisasi segenap kekuatan menuju implementasi penuh tentang Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu, Wakil Direktur Jenderal Urusan ASEAN untuk Myanmar Aung Htoo, telah menyatakan bahwa Myanmar ingin membuat kemajuan melalui sebuah ASEAN yang berfokus pada masyarakat, perdagangan manusia, dan buruh migran<sup>24</sup>.

Meski pemerintahan semi-demokrasi yang sekarang telah membuat beberapa langkah penting untuk menjadi negara demokrasi, penting bagi Myanmar untuk menggunakan waktu ini untuk me-

<sup>23</sup> Jane Perlez, "Myanmar in Lead Role At a Regional Meeting," *The New York Times*, 11 October 2013.

<sup>24</sup> Yohanna Ririhena, "Myanmar assures readiness to host ASEAN 2014," *The Jakarta Post*, 17 June 2013.

ngelola masalah domestiknya dan menangani berbagai konflik etnis. Kekhawatiran ini telah diungkapkan pada bulan April 2013 oleh Presiden Yudhoyono selama KTT ASEAN, yang juga menawarkan bantuan bersama dengan pemerintah Thailand, untuk mengatasi masalah konflik etnis ini. Namun, tawaran itu ditolak secara halus oleh Myanmar dengan mengklaim bahwa masalah ini merupakan urusan dalam negeri dan harus ditangani secara tepat<sup>25</sup>. Implementasi secara tepat untuk menangani masalah ini penting bagi pemerintah Myanmar agar mendapat kepercayaan dari masyarakat internasional, termasuk PBB dan tentu saja dari negara-negara ASEAN, yang telah menunjukkan dukungan terhadap Myanmar untuk mengambil kepemimpinan tahun depan, meskipun adanya kritik terus menerus dari banyak LSM hak asasi manusia.

Sebetulnya Indonesia berada dalam posisi tepat untuk memberikan bantuan ke Myanmar dalam persiapan untuk kepemimpinan, dan itu akan sangat menguntungkan dalam membantu Myanmar pada persiapan teknis untuk menjadi tuan rumah ratusan pertemuan ASEAN yang saling terkait. Lebih penting lagi, Indonesia, sebagai negara anggota yang paling berpengaruh, bisa membantu Myanmar dalam mendirikan agenda untuk kepemimpinan, terutama untuk mendorong penciptaan Code of Conduct (CoC) dalam kaitannya dengan sengketa Laut China Selatan dan untuk membuat ASEAN yang lebih berorientasi kepada masyarakat dan yang responsif terhadap masalah keamanan manusia di wilayah tersebut.

Akhirnya, penting untuk memastikan kesuksesan dari kepemimpinan ini setidaknya atas dasar dua alasan. *Pertama*, untuk menunjukkan dukungan ASEAN terhadap Myanmar dan membuktikan bahwa negara ini mampu menjadi anggota ASEAN 'normal' dan seharusnya tidak lagi dianggap sebagai titik lemah (*achilles heel*) ASEAN. *Kedua*, kepemimpinan ini merupakan bagian integral karena keberhasilannya akan bergantung pada kemampuan Myanmar untuk membangun kemajuan yang dimulai oleh Brunei dalam menciptakan batu loncatan untuk mencapai Komunitas ASEAN pada tahun 2015.

---

<sup>25</sup> "Indonesian leaders air concern on Myanmar violence", 26 April 2013, <http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/26/indonesian-leader-air-concern-myanmar-violence.html>